

TAJUK RENCANA

Titik Terang PT Sritex

MASALAH yang sedang dihadapi PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) setelah diputuskan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang tampaknya akan segera menemukan titik terang. Setelah pihak manajemen menegaskan bahwa PT Sritex tetap beroperasi dan tidak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK), Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita optimistis akan segera dapat menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi PT Sritex.

Terakhir, Menperin menyatakan sudah membahas langkah-langkah ke depan yang akan diambil pemerintah untuk menyelamatkan PT Sritex dengan dua kemungkinan. Pertama, jika kasasi Sritex dikabulkan. Kedua, jika kasasi Sritex ditolak. Apapun putusan kasasi, pemerintah tetap memiliki komitmen untuk menyelamatkan tenaga kerja Sritex. Artinya, PT Sritex harus dapat terus beroperasi sehingga tidak PHK di PT Sritex.

Menurut Menperin, langkah yang harus dilakukan pemerintah adalah, bagaimana PT Sritex tetap berproduksi dan dapat mengeksport produknya untuk pasar luar negeri. Kalau Sritex tetap berproduksi namun produknya tidak dapat diekspor karena tidak dapat keluar dari kawasan berikat, maka tetap akan ada bayang-bayang PHK. Karena itu pemerintah harus memberikan kepastian bahwa produk Sritex dapat diekspor.

Menperin juga berharap PT Sritex dapat menemukan titik terang homolog dengan para kreditur, sehingga bisa terlepas dari status pailit. Hal itu mengingat Sritex dinilai punya komitmen tinggi untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi.

Sebelumnya, Komisaris Utama PT Sritex Tbk Iwan S Luminto juga mengungkapkan, Peraturan Menteri Perdagangan RI (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, membuat

industri tekstil dalam negeri sengsara. Banyak industri tekstil dalam negeri terdampak peraturan tersebut, bahkan ada yang tutup.

Terkait hal itu, Iwan S Luminto minta agar pemerintah mengevaluasi Permendag Nomor 8 Tahun 2024, karena peraturan tersebut berpengaruh sangat signifikan terhadap industri tekstil dalam negeri. Kalau dicermati, sangat mungkin kondisi Sritex saat ini juga tidak lepas dari dampak peraturan tersebut.

Menanggapi keluhan Iwan S Luminto, belum lama ini, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita juga mengatakan bahwa keluhan Sritex merupakan fakta bahwa Permendag tersebut memang merugikan industri tekstil dalam negeri. Kebijakan itu sudah menjadi isu yang harus dihadapi industri tekstil, bukan hanya permasalahan keuangan dan pasar ekspor yang sedang lesu, tetapi industri tekstil dalam negeri juga perlu proteksi dari pemerintah.

Melihat gerak cepat dan langkah-langkah strategis Presiden Prabowo Subianto berkaitan dengan kondisi PT Sritex ini, banyak pihak berharap pemerintah benar-benar dapat menyelamatkan keberadaan PT Sritex. Hal itu mengingat puluhan ribu tenaga kerja dan warga sekitar pabrik menggantungkan hidup mereka kepada PT Sritex.

Dampak ekonomis PT Sritex selama ini benar-benar dapat dirasakan masyarakat Sukoharjo dan sekitarnya. Bahkan Sritex juga berkontribusi besar terhadap pendapatan Pemkab Sukoharjo. Karena itu, keberlangsungan PT Sritex tidak cukup hanya mendapat dukungan dari Kementerian Perindustrian, tetapi juga perlu dukungan Kementerian Perdagangan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan kementerian-kementerian lain dalam Kabinet Merah Putih.

Semoga titik terang untuk PT Sritex benar-benar segera dapat dirasakan terangnya. □ - f

Kepahlawanan Santri dalam Moderasi Beragama

Adhi Setiyawan

HARI Pahlawan, yang besok Minggu 10 November kita peringati, dan Hari Santri 22 Oktober memiliki hubungan sangat erat. Keduanya menjadi momen penting, mengingatkan bangsa Indonesia akan peranan kaum santri dan ulama dalam mempertahankan kemerdekaan. Fatwa resolusi jihad pada 22 Oktober 1945 oleh KH Hasyim Asyari (pendiri Nahdlatul Ulama) menyerukan kepada seluruh umat Islam, terutama santri dan ulama, untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari ancaman kolonial Belanda. Fatwa jihad tersebut menjadi pemicu utama perlawanan di Surabaya, yang kemudian memuncak dalam Pertempuran 10 November 1945. Pertempuran itu kemudian dipeperangi sebagai Hari Pahlawan untuk menghormati keberanian arek-arek Surabaya, para santri, ulama, dan rakyat Indonesia yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk mempertahankan kemerdekaan.

Dalam konteks ini, Hari Santri melatar belakangi spiritual dan ideologis semangat perlawanan pada Hari Pahlawan. Resolusi Jihad sebagai perlawanan terhadap Sekutu di Surabaya menunjukkan bahwa mempertahankan kemerdekaan bukan hanya soal politik dan militer, tetapi menyangkut prinsip keagamaan dan rasa cinta tanah air. Para santri dalam medan perang membuktikan bahwa nilai-nilai keagamaan berjalan seiring dengan nasionalisme, di mana agama menjadi inspirasi yang sangat kuat untuk mempertahankan kedaulatan negara Indonesia tercinta.

Peringatan Hari Santri dan Hari Pahlawan bersama-sama menjadi refleksi pentingnya peran santri sebagai garda terdepan dalam menjaga dan mempertahankan kemerdekaan. Hari Pahlawan mengingatkan kita pada puncak perlawanan fisik untuk mempertahankan kemerdekaan, sementara Hari Santri mengingatkan kita akan semangat keagamaan menggerakkan perjuangan. Kedua hari ini memiliki kesamaan nilai: yaitu pengorbanan, patriotisme, dan ketulusan dalam berjuang demi bangsa dan negara.

Santri berperan sebagai penjaga NKRI di garis depan, sejalan dengan semangat Resolusi Jihad untuk melawan ancaman penjajahan. Semangat mengabdikan dan semangat kebangsaan berjalan seiring iden-

titas religiusnya. Pada era modern saat ini, semangat mengabdikan, berbangsa berjalannya seiring identitas religiusnya berkembang menjadi moderasi beragama. Hal ini menjadi cerminan ajaran Islam yang *rahmatan lil 'alamin* (penebar kasih sayang bagi semesta) tetapi juga menjadi benteng dari berbagai ancaman ideologis dan konflik yang dapat mengganggu persatuan bangsa. Moderasi beragama mendorong kita untuk memahami dan menjalankan



KR-JOKO SANTOSO

Islam, toleran, dan penuh kasih sayang, serta melawan segala bentuk ekstremisme yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan. Moderasi beragama menjauhkan dari *ashobiyah* (mementingkan golongan) dan *ananiyah* (mementingkan pribadi) bergerak menuju beragama yang *bermasalahah*. Konsep "beragama yang *bermasalahah*" berkaitan erat dengan prinsip moderasi beragama, yang berfokus pada membawa manfaat (*maslahah*) bagi masyarakat luas. Prinsip ini membuat harmoni nilai-nilai keagamaan dengan tuntutan kehidupan modern agar menjadi solusi pembawa manfaat, bukan sumber konflik. Penerapan moderasi beragama dan beragama yang *bermasalahah* sebagai jalan tengah mencegah radikalisme dan intoleransi. Prinsip beragama *maslahat* menekankan sikap *tawasuth* (moderat), *tasamuh* (toleransi), dan musyawarah dalam setiap interaksi

sosial dan dalam menghadapi keberagaman.

Tantangan era digital membawa paham-paham radikal yang berpotensi memecah belah masyarakat. Ketika paham-paham tersebut masuk, tidak jarang generasi muda menjadi sasaran karena rentan terhadap informasi yang menyimpang. Santri dengan pendidikan agama yang mendalam memiliki posisi strategis untuk meneguhkan ajaran agama yang benar dan mencegah infiltrasi ideologi ekstrem yang dapat mengganggu stabilitas negara. Melalui pendekatan moderasi beragama,

santri berperan sebagai pilar kestabilan negara, mengajarkan toleransi, serta mendorong masyarakat untuk hidup berdampingan dalam keberagaman.

Kata "santri" memiliki beberapa teori asal usul dari bahasa Sanskerta, tetapi bukti linguistik yang konkret sulit ditemukan karena ada banyak pendapat tanpa kesepakatan tunggal di kalangan ahli. Beberapa ahli menduga kata ini berasal dari istilah seperti *sastrī* (yang berarti "orang berpengetahuan" atau "pendidik") atau *sranta*, yang berkaitan dengan orang yang rajin dan taat dalam studi. Akan tetapi, tidak ada bukti langsung yang memastikan asal-usul ini, dan kemungkinan kata "santri" berkembang dari budaya lokal Nusantara. Terlepas dari etimologi tersebut, setiap orang yang berpengetahuan atau pendidik,

rajin taat dalam belajar maka kata santri tersemat dalam dirinya. (*)-d

***Dr Adhi Setiyawan MPd, Peserta PKDP PTP UIN Sunan Kalijaga 2024, Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.**

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.
Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).
Penerus: Dr H Soemardi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Komisaris Utama:** Imam Satriyadi, SH. **Komisaris:** Mohammad Wirmon Samawi, SE., MIB. **Direktur Utama:** Drs. H.Mohammad Idham Samawi. **Direktur Keuangan:** Yuriya Nugroho Samawi, SE., MM., MSc. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSos. **Direktur Litbang, Pengawasan & Bisnis:** Yoeke Indra Agung Laksana, SE **Direktur Umum:** Ir. Dyah Sardjuningrum Sitawati.

Pemimpin Umum: Drs. H. Mohammad Idham Samawi. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Dr Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Dr Ronny Sugiantoro, MM,CHE. **Redaktur Pelaksana:** Primawolo Sudjono SPT, Joko Budiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Efly Wijono Putro, Surya Adi Lesmana. **Gratis :** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Kepala TU Langganan: Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting) Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)
Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankryk23@yahoo.com, iklankryk13@gmail.com.
Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluaran...Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris) . Rp 12.000,00/ baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)
Alamat Percetakan: Jalan Raya Yogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan
Alamat Homepage: <http://www.kr.co.id> dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.
Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani .
Wartawan : H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.
Semarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.
Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.
Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.
Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.
Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan -
Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.

CATATAN HAUL KE-36 KH ALI MAKSUM

Kiai Ali, NU dan Moderasi Bangsa

Arief Fauzi Marzuki

KH ALI MAKSUM, yang haulnya ke-36 hari ini diperingati, adalah ulama besar Nahdliyyin yang lahir di Lasem, Jawa Tengah tahun 1915. Kiai Ali merupakan putera dari salah satu pendiri NU, yaitu KH Maksum Ahmad dengan Nyai Hj Nuriyati. Selain menjadi murid Syekh Dimiyathi Tremas di Pacitan, KH Ali Maksum juga menantu ulama besar ahli Alquran, yaitu KHM Moenawwir Krapyak Yogyakarta.

Dalam kiprah keulamaannya, KH Ali Maksum mulai mengembangkan pesantren milik ayahnya di Soditan Lasem. Setelah pulang dari Makkah tahun 1941, Kiai Ali menekuni bidang tafsir, mewarisi gurunya yaitu Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki al-Hasani dan Syekh Umar Hamdan.

Setelah wafatnya KHM Moenawwir tahun 1942, Kiai Ali fokus mengembangkan Pesantren Krapyak bersama saudara iparnya, yaitu KHR Abdul Qadir Moenawwir dan KHR Abdullah Afandi Moenawwir yang kemudian disebut "Tiga Serangkai". Perjuangan tersebut berhasil membesarkan Pesantren Krapyak, meski perjuangannya dimulai pada masa yang sulit sejak penguasaan Jepang sampai saat revolusi kemerdekaan, dan masa-masa berikutnya. (Ahmad Athoillah:2022).

Lima Wasiat untuk Kader Nahdliyyin

Kiai Ali yang pernah menjabat sebagai Rais 'Aam PBNU (1980-1984) mempunyai wasiat kepada para nahdliyyin yang tentu bisa diterapkan oleh semua orang dan lintas organisasi.

Pertama, *al-'alimu wat ta'alum bi nahdlatil ulama* (Nahdliyyin mesti mempelajari apa dan bagaimana NU). Warga NU harus mengenal betul apa sebenarnya NU, siapakah tokoh-tokohnya, bagaimana gerakannya di masyarakat masa lalu, masa kini dan masa datang.

Kedua, *al-iamalu bi nahdlatil ulama* (mengamalkan NU). Setelah mengenal dan memahami NU, Nahdliyyin harus mengamalkan apa yang menjadi *amaliyah* yang masyhur oleh NU dan mengikuti sesepuh yang mengambil kebijakan di ranah sosial, politik dan budaya.

Ketiga, *al-jihadu bi nahdlatil ulama* (ji-

had dengan NU). Kader wajib memperjuangkan apa yang telah diputuskan organisasi semaksimal mungkin apa yang menjadi keputusan organisasi di segala tingkatan.

Keempat, *ash-shabru bi nahdlatil ulama* (sabar dalam berjuang bersama NU). Kader harus mempunyai kesabaran yang tinggi dalam rangka merawat dan menjaga jamaah, yang mempunyai keberagaman budaya dan perbedaan pilihan politik.

Kelima, *ats-tsiqatu bi nahdlatil ulama*, artinya warga NU harus memiliki keyakinan terhadap perjuangan NU bahwa NU merupakan ormas yang mendapat ridha Allah SWT. Bahwa dengan berjuang bersama NU, dapat membawa kita masuk ke surga.

Implementasi wasiat di atas sudah ditunjukkan warga NU dalam aksi bertajuk "Santri Menganggil" di Polda DIY beberapa waktu lalu, yang bisa berjalan dengan damai dan aman, yang dihadiri hampir lima belas ribu santri dan masyarakat lainnya.

Tokoh Moderasi Bangsa
SEBAGAI bangsa yang masyarakatnya amat majemuk, kita sering menyaksikan adanya gesekan sosial akibat perbedaan cara pandang masalah keagamaan. Ini dapat mengganggu suasana rukun dan damai yang kita idam-idamkan bersama. Selain itu, ada lagi orang yang atas nama agama ingin mengganti ideologi negara, yang sudah menjadi kesepakatan bersama bangsa kita.

Ini semua fakta yang kita hadapi, karena keragaman paham umat beragama di Indonesia memang amat tak terperi. Nyaris tak mungkin alias mustahil kita bisa menyatukan cara pandang keagamaan umat beragama di Indonesia. Sementara, keragaman klaim kebenaran

atas tafsir agama, bisa memunculkan gesekan dan konflik.

Untuk persoalan kerukunan umat, Kiai Ali Maksum tahun 1970-an dan 1980-an sudah mengupayakan pentingnya kerukunan umat beragama. Kiai Ali mendukung adanya berbagai forum ukhuwah demi mengatasi krisis besar umat Islam. Dalam catatan Zuhdi Muhdlor (1989) berjudul KH Ali Maishum: Perjuangan dan Pemikiran-Pemikirannya, Kiai Ali bersama tokoh NU lainnya mengaggas pentingnya *ukhuwah Islamiyah* (persamaan akidah), *ukhuwah basyariyah* (kemanusiaan), dan *ukhuwah wathaniyah* (perasaan satu bangsa dan negara) untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Kiai Ali juga mengajak agar umat Islam tidak memperuncing masalah *khilafiyah* dan menyinggung perasaan umat lain.

Kiai Ali juga memberi saran kepada pemerintah, terutama ketika munculnya RUU Perkawinan tahun 1973 yang dianggap bertentangan dengan hukum Islam. Pada Mei 1974, Kiai Ali juga menyampaikan pandangannya kepada Presiden Soeharto tentang pentingnya perhatian kepada hak beragama umat Islam yang dijamin oleh Pancasila. (*)-d

***)Arief Fauzi Marzuki, Alumnus Pesantren Krapyak Ali Maksum, dan PAI pada Kemenag Bantul.**

Pojok KR

Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan akan menindak pimpinan yang korup.

- Ikan busuk? ***

Terkait korupsi LPEI, KPK menyita 44 properti senilai Rp 200 miliar.

- Luar biasa! ***

Abrasi di pantai selatan Bantul semakin parah dan mengancam lingkungan.

- Daratan makin terkikis.

Beraksi